

ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA

Totok Mardikanto

Guru Besar Penyuluhan Pertanian pada Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

Considering aspect of human resources more being of adaptive in development of important horticulture agribisnis is immediately paid attention. This matter is caused to realize real human resources being of organizer and determinant of efficacy from each; every effort horticulture agribisnis. Progress in technological innovation of production for the type of this agribisnis will become without effect without beforehand the existence of renewal at human being aspect.

PENDAHULUAN

Sejak mengalami masa penjajahan, sejarah telah membuktikan bahwa pembangunan pertanian selalu mendapat perhatian pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, terlebih sejak era pembangunan yang dipimpin oleh Orde Baru, pembangunan pertanian selalu dijadikan titik berat dalam pembangunan nasional bidang ekonomi. Bahkan sampai dengan GBHN 1993 sudah disepakati bahwa, peranan sektor pertanian masih sangat diperlukan, baik untuk melestarikan swasembada pangan, penyedia bahan

baku industri, maupun untuk mendukung ekspor non-migas.

Sejalan dengan nilai penting dari pembangunan pertanian dalam keberlangsungan bangsa maka saat memasuki era industrialisasi selama Pembangunan Nasional Jangka Panjang Kedua atau PJP-II, kegiatan agribisnis (terutama agroindustri) tetap merupakan kegiatan utama yang akan mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan menyadari kegiatan ini memiliki pautan (*linkages*), baik pautan ke belakang (*backward linkages*) dan pautan ke depan (*forward linkages*) yang sangat luas sehingga dapat diharapkan peranannya untuk kelangsungan bagi

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Kemajuan pembangunan pertanian khususnya yang berwawasan agribisnis dalam proses pengembangan sumberdaya manusia tertaut erat dengan keberhasilan pembaharuan dalam berbagai sub sektor pertanian dengan ragam komoditas seperti: hortikultura, tanaman pangan, buah-buahan, tanaman hias dan lainnya. Pada tulisan ini, pokok bahasan akan ditujukan untuk mengulas tentang permasalahan aspek sumberdaya manusia dalam pengembangan agribisnis hortikultura.

Permasalahan Kondisi Objektif Sumberdaya Manusia dalam Agribisnis Hortikultura

Gunawan Satari seorang pakar pertanian dari Institut pertanian Bogor dalam suatu kesempatan ilmiah pernah menyatakan bahwa telaahan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan produksi hortikultura, dapat ditelusuri melalui 3 (tiga) kacamata: produsen, konsumen, dan kebijaksanaan pemerintah yang

mencakup hal-hal yang bersifat: teknis, ekonomi, dan sosial-budaya. Berkaitan dengan itu, nampaknya telah menjadi kebiasaan, bahwa telaahan tentang aspek SDM dalam proses pembangunan pertanian seringkali hanya dibatasi pada aspek SDM sebagai produsen (baik sebagai pelaksana kegiatan berproduksi maupun sebagai pengelola). Sedang telaahan SDM sebagai konsumen dan penentu kebijakan pembangunan, hampir tidak pernah diperhatikan.

Gambaran umum tentang petani sebagai produsen, antara lain dapat dikaji dari pernyataan Soedarsono, yang menyatakan bahwa: pembangunan pertanian yang dilaksanakan di Indonesia selama ini, pada hakekatnya tertumpu pada kegiatan petani-petani kecil, yang pada umumnya termasuk golongan ekonomi lemah. Mereka dikatakan lemah tidak saja lemah dari segi ekonomi terutama ditinjau dari permodalan dan besarnya aset yang dimiliki. Akan tetapi juga lemah dalam hal perlengkapan yang

digunakan, lemah ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki, serta seringkali juga lemah dalam semangatnya untuk maju. Sebagai konsumen hortikultura, gambaran umum yang dapat diberikan adalah: bahwa sebagian besar konsumen potensial produk hortikultura terdiri dari lapisan menengah ke atas yang cenderung lebih menyukai produk impor atau produk bernilai ekonomi tinggi dan pemenuhan kebutuhan psikologis yang mencerminkan status dibanding kebutuhan fisiologis (nilai gizi). Lebih lanjut, kebijakan pengembangan hortikultura belum secara sungguh-sungguh diarahkan kepada pola pembentukan sentra-sentra produksi dalam skala yang luas dan belum ditangani sebagai suatu sistem agribisnis yang terpadu.

PEMBAHASAN

Gambaran umum tentang petani di Indonesia seperti itu, mungkin masih banyak dijumpai di banyak tempat, akan tetapi berkaitan dengan usaha tani hortikultura,

kenyataan seperti itu mungkin sudah sangat sulit ditemukan. Sebab, usahatani hortikultura pada dasarnya lebih bersifat komersial karena sebagian terbesar produknya bukan untuk dikonsumsi sendiri tetapi dijual, baik yang diusahakan sebagai usahapokok maupun sebagai usahasampingan.

Karena itu, produsen hortikultura umumnya lebih "*progresif*" dan selalu memperhatikan permintaan pasar yang menuntut persyaratan jenis dan mutu barang yang akan dibeli. Meskipun demikian, harus diakui bahwa (secara umum) mereka masih menghadapi banyak kendala, terutama yang berkaitan dengan informasi dan pemasaran produk. Tentang hal ini, nampaknya perlu banyak pembenahan yang berkaitan dengan visi dan misi penyuluhan serta penataan kelembagaan kemitraan usaha (Hadisapoetro, 1970).

Berbicara tentang perilaku konsumen yang pada umumnya "*berselera tinggi*", di satu pihak

merupakan rangsangan yang sangat baik bagi pengembangan produk hortikultura; tetapi sekaligus juga dapat merupakan ancaman jika peluang tersebut tidak segera diantisipasi dengan pemilihan jenis komoditas dan peningkatan mutu produk dan pelayanannya. Lebih lanjut lagi, berkaitan dengan penyusunan agenda kebijakan pembangunan pertanian hortikultura, Gunawan Satari juga telah mengisyaratkan agar kelembagaan hortikultura dipindahkan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. Hal ini, dilatarbelakangi oleh kondisi landasan pemikiran yang berkenaan dengan kenyataan bahwa pengembangan hortikultura hanya akan maju jika dikelola dengan pendekatan agribisnis yang efisien dalam skala ekonomi tertentu, serta didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang intensif dan berkelanjutan.

Alternatif Usulan Solusi :
Pemanfaatan Peran Penyuluhan
Pertanian

Meskipun sejak dini para penyuluh pertanian telah dibekali dengan pemahaman bahwa filosofi penyuluhan adalah "membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri," namun di dalam praktek penyuluhan, kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak mengacu kepada upaya "mengamankan kebijakan pemerintah." Ironisnya, selama PJP-I, kebijakan pembangunan pertanian lebih mengacu kepada peningkatan produksi. Oleh karena itu, materi yang disampaikan lebih banyak berisi rekomendasi-rekomendasi teknis atau kebijakan dan peraturan pemerintah yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan pasar dan dijamin dapat memberikan peningkatan pendapatan-petani.

Reorientasi penyuluhan pertanian yang lebih mengacu kepada "pemberdayaan masyarakat" dengan lebih banyak memberikan informasi pasar masih lemah dalam materi kebijakan yang dikeluarkan dan diberlakukan pemerintah (Mardikanto, 1994). Di samping itu, warna

pelaksanaan berbagai praktek yang bertautan dengan penyuluhan pertanian lebih bersifat menggurui. Tenti saja cirri seperti ini perlu segera dihentikan untuk diganti dengan kegiatan pendampingan yang partisipatif seperti dikemukakan oleh Kelsey and Hearne (1955) baik sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun sampai tahap evaluasi kegiatannya.

Berbicara tentang pengembangan agribisnis hortikultura, akan membawa konsekuensi perlunya tambahan investasi dan peningkatan akses pasar, yang kesemuanya itu hanya dapat tercapai manakala dapat dikembangkan hubungan kemitraan yang serasi antara petani produsen dengan investor yang memiliki akses pasar yang dapat diandalkan. Berkaitan dengan hubungan kemitraan tersebut perlu diperhatikan bahwa hubungan kemitraan harus bersifat sinergis dalam arti memadukan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing pihak ke arah tercapainya peningkatan pendapatan yang saling menguntungkan, dan saling berbagi

menanggung risiko; dan bukan hubungan yang saling memeras atau menipu. Untuk itulah, diusulkan adanya Tim Asistensi yang menjembatani hubungan antara birokrasi, investor, dan masyarakat (petani).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam setiap upaya pengembangan agribisnis hortikultura perlu memperhatikan aspek sumberdaya manusia. Berkaitan dengan upaya sosialisasi konsumsi hortikultura, perlu segera dirancang suatu model peningkatan konsumsi hortikultura yang lebih berorientasi pada nilai-gizi dibanding status atau gengsi. Dengan memperbaharui aspek sumberdaya manusia maka dalam pengembangan sentra produksi hortikultura seperti yang dimaksud di sini, bukan lagi hanya sekadar membentuk dan menumbuhkan berbagai pusat produksi dalam arti kuantitatif, tetapi yang senantiasa memperhatikan :

a) skala ekonomi yang efisien

- b) keunggulan kompetitif (*competitive advantage*)
- c) kesesuaian lahan dan kelestarian ekologis

Kelsey, L.D. and C.D. Hearne, 1955. *Cooperative Extension Work*. New York: Comstock Publishing Association

Mardikanto, T. 1994. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: UNS-Press.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Satari 1990. Peningkatan Produksi Hortikultura. Makalah disajikan pada *Temu Wicara Hidroponik* di Semarang, tanggal 20 Nopember 1990.
- Hadisapoetro, S. 1970. Modernisasi Usahatani Sebagai Landasan Pembangunan Pertanian. *Bull Fakultas Pertanian UGM* No.2/1970.
- , 1994. Penyuluhan Agribisnis Untuk Petani-Kecil. Makalah disampaikan pada *Seminar Agribisnis Petani Kecil* di UNS, 1994.